



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN: STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN

Akhmad Amirudin^{1)*}, Akil Fitra Sholakodin²⁾, Dewi Ariyanti Sofie³⁾, Dea Avriliya Maharani⁴⁾, Aissyah Nabila Anjani⁵⁾, Catherine Eugene Natasha⁶⁾, Markus Mario Rolas Patiar Batuara⁷⁾, Eva Fadilah Ramadhani⁸⁾

¹⁾ akhmadamirudin@ub.ac.id, Universitas Brawijaya

²⁾ akilfitra.kat13a@gmail.com, Universitas Negeri Malang

³⁾ dewiariyanti50@gmail.com, Universitas Brawijaya

⁴⁾ deaavrilia77@gmail.com, Universitas Brawijaya

⁵⁾ aissyahnabilaanjani@gmail.com, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

⁶⁾ catherinenatashaa@gmail.com, Universitas Brawijaya

⁷⁾ markusrolas12@student.ub.ac.id, Universitas Brawijaya

⁸⁾ evafadr@gmail.com, Universitas Brawijaya

Abstract

This study aims to provide a comprehensive picture of the readiness for the implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) in Vocational High Schools (SMK) in Banten Province. The primary objectives of implementing BLUD are to enhance flexibility and transparency in school financial management and to foster school independence in delivering educational services. The research method employed is a qualitative case study, incorporating in-depth interviews, observations, and document analysis. Interviews were conducted with various stakeholders such as school principals, teachers, administrative staff, and industry partners to gather data on the readiness for BLUD implementation. The findings indicate that the existing conditions in Banten Province are conducive to supporting the implementation of BLUD. The study further outlines criteria for implementing BLUD based on Permendagri 79 of 2018, which classifies schools into clusters A, B, and C, depending on their readiness levels. Several schools have been identified as reference schools for the BLUD implementation plan in Banten Province. These reference schools are categorized based on their existing conditions to guide the phased implementation process.

Keywords: BLUD, Financial Management, Flexibility, Transparency, Vocational High School

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Banten. Tujuan utama dari implementasi BLUD adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, serta menciptakan kemandirian sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan mitra industri untuk mengumpulkan data tentang kesiapan implementasi BLUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting di Provinsi Banten dinilai mendukung penerapan BLUD. Studi ini juga menjelaskan kriteria penerapan BLUD berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, yang mengklasifikasikan sekolah-sekolah ke dalam cluster A, B, dan C berdasarkan tingkat kesiapan mereka. Beberapa sekolah telah diidentifikasi sebagai sekolah rujukan untuk rencana implementasi BLUD di Provinsi Banten. Sekolah-sekolah rujukan ini dikategorikan berdasarkan kondisi eksisting mereka untuk memandu proses implementasi bertahap.

Kata Kunci: BLUD, Fleksibilitas, Pengelolaan Keuangan, Sekolah Menengah Kejuruan, Transparansi

PENDAHULUAN

Pendidikan dianggap sebagai faktor penting untuk kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia (Mayasari, 2020). Tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan dengan memelihara dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang memperkuat iman, takwa, dan akhlak mulia seluruh rakyat, menurut Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemerintah dalam menjamin bahwa semua orang di Indonesia menerima layanan pendidikan yang sama (Shaturaev, 2021). Untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat,



pemerintah menggunakan BLUD (Yulius Hari et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018, BLUD adalah sistem yang digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah. BLUD tidak terbatas oleh peraturan pengelolaan daerah secara keseluruhan, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah melalui penyediaan layanan umum yang lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Menurut Godda (2018), kepala daerah memainkan peran penting dalam penerapan sistem BLUD di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pasal 2 ayat 2, menetapkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan umum.

Pendidikan adalah salah satu bidang yang dapat menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena bidang ini membutuhkan kepala daerah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kepala daerah setempat berfokus pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat menerapkan BLUD (Sudiyono et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil peserta didik dari SMK dirancang untuk memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, kewirausahaan juga diajarkan di SMK (Mahfuda, 2022). Dalam pelaksanaan BLUD, pendidikan wirausaha dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan. Menjadikan SMK sebagai salah satu target penerapan BLUD adalah langkah strategis yang diambil oleh Direktorat SMK. Hal ini dilakukan untuk memberi payung hukum kepada SMK untuk dapat menjalankan Unit Produksi, *Teaching Factory* (TEFA), dan usaha lain yang selama ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi (Sudiyono et al., 2019).

Teaching Factory adalah salah satu bentuk upaya di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan soft skill siswa (Sudiyono et al., 2019). *Teaching Factory* adalah model pembelajaran berbasis produk (barang atau jasa) yang digunakan oleh sekolah dan sektor industri untuk menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan industri (Saputro, 2024). *Teaching Factory* yang ideal akan berdampak positif pada kompetensi siswa dan memberikan peluang besar bagi siswa untuk memulai bisnis mereka sendiri (Prianto, 2022). Oleh karena itu, *Teaching Factory* bukan hanya meningkatkan kompetensi siswa untuk memenuhi kebutuhan industri tetapi juga menanamkan semangat usaha pada siswa (Abdullah, 2021).

Di Pulau Jawa, mayoritas provinsi sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Amany et al., 2020). Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi di pulau Jawa yang belum menerapkan BLUD Pendidikan khususnya di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Adanya *Teaching Factory* dalam dunia pendidikan akan berdampak terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Mengingat di Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 8,09% dan 13,52% merupakan lulusan dari SMK.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diterapkan dengan baik di wilayah lain. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan sekolah-sekolah yang menerapkan BLUD di bidang pendidikan khususnya daerah-daerah yang memiliki jarak wilayah yang cukup dekat dengan Provinsi Banten seperti Provinsi Jakarta. Dengan penerapan BLUD maka dampak positif yang didapatkan diantaranya adalah pendapatan sekolah yang dihasilkan dari penjualan produk dapat digunakan langsung, kebutuhan belanja menjadi *flexible budget* dengan menyesuaikan ambang batas kemampuan, pengelolaan barang dapat dikecualikan dari aturan



umum pengadaan dan juga mengurangi beban pemerintah karena dana publik yang dikelola oleh BLUD tersebut dapat dikelola secara mandiri (Baskoro et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan terkait belum diterapkannya BLUD pada SMK di Provinsi Banten. Tujuan adanya BLUD di bidang pendidikan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga harapannya dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada tingkat SMK yang terdapat di Provinsi Banten menjadikan alasan bahwa penerapan BLUD harus segera diwujudkan. Pengimplementasian BLUD di SMK yang terdapat di Provinsi Banten membutuhkan persiapan yang matang baik dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, kurikulum, produk yang dihasilkan, kerjasama dengan sektor industri dan swasta. Oleh karena itu, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kriteria sekolah yang dapat di BLUD? 2. Bagaimana pembagian sekolah berdasarkan prioritas terkait kelayakan sekolah untuk di BLUD? 3. Bagaimana penerapan BLUD di bidang pendidikan pada jenjang SMK?. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan seluruh sekolah jenjang SMK yang terdapat di Provinsi Banten dalam persiapannya untuk menerapkan sekolah dengan sistem BLUD.

KAJIAN PUSTAKA

Kurikulum Pendidikan SMK

Pendidikan kejuruan adalah program sekolah menengah yang bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk bekerja di bidang tertentu (Nuryanto & Eryandi, 2020). Pendidikan ini diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini berbeda dari pendidikan kejuruan di perguruan tinggi yang lebih luas. Sejak awal, tujuan SMK adalah mendidik siswa untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan kompeten. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2018), lulusan SMK diharapkan dapat mulai bekerja. Tujuan pendidikan kejuruan di tingkat menengah ini adalah untuk memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja.

Pendidikan kejuruan membedakannya dari pendidikan menengah lainnya dengan beberapa fitur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi tuntutan industri dan bisnis di dalam dan luar negeri. Selain itu, tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk menyediakan siswa dengan keahlian teknis untuk program keahlian teknik (Suharno et al., 2020). Mengembangkan berbagai produk penelitian dan program inovatif dalam bidang pendidikan teknologi kejuruan (PTK) dan ilmu teknik adalah tujuan lain dari pendidikan ini. Ini akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam proses pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan kejuruan berfungsi sebagai pusat diseminasi dan informasi tentang pendidikan teknologi serta menghasilkan pendidik atau pelatih yang memiliki semangat kewirausahaan.

Teaching Factory

Teaching Factory adalah konsep pembelajaran di SMK yang berbasis produksi atau jasa dengan acuan standar, prosedur, dan industri kerja (Kristanto et al., 2023). Konsep ini menggabungkan belajar dengan lingkungan kerja nyata, memberi siswa SMK pengalaman belajar yang relevan dan praktis. Proses pembelajaran *Teaching Factory* diintegrasikan dengan tujuan membuat barang atau jasa yang layak untuk dibeli, yang menghasilkan nilai tambah bagi sekolah. Selain itu, pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi wirausahawan, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan manajemen dan bisnis sejak awal (Purwanto, 2022).

Berdasarkan Tata Kelola Pelaksanaan Pabrik Pengajaran (Direktorat Pembinaan SMK, 2017), ada beberapa prinsip dasar yang mendukung konsep ini. Pertama, kurikulum SMK dengan *Teaching Factory* memasukkan pengalaman dunia kerja untuk memastikan bahwa



semua peralatan dan bahan serta siswa dirancang untuk melaksanakan proses produksi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Kedua, konsep ini memungkinkan siswa terlibat langsung dalam proses produksi karena menggabungkan pembelajaran berbasis produksi dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Dengan keterlibatan langsung ini, kompetensi yang dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri, mempersiapkan siswa untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap masuk ke dunia kerja.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk SMK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 menetapkan konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan unit kerja perangkat daerah yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan keuntungan finansial. BLUD memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel daripada standar umum pengelolaan daerah, memungkinkan unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah untuk bekerja dengan lebih efisien dan menanggapi kebutuhan masyarakat (Bala, 2023). Sistem BLUD ini tetap beroperasi dalam kerangka kebijakan dan regulasi pemerintah daerah karena mereka merupakan bagian penting dari pemerintah daerah.

Dibandingkan dengan SKPD umumnya, penerapan BLUD di SMK memberikan beberapa keuntungan besar. BLUD memungkinkan sekolah untuk memberikan layanan masyarakat yang lebih baik dengan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Menurut Sudiyono et al. (2019), peningkatan kompetensi guru dan siswa dapat membawa peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan SMK. Selain itu, BLUD dapat membantu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan. Instruksi ini mengarahkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, menteri kabinet kerja, dan gubernur, untuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SMK di Indonesia. Akibatnya, penerapan BLUD di SMK tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membantu mencapai tujuan sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan nasional.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk mendukung penyajian data, kuantitatif menekankan hasil penelitian melalui deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam (Nugrahani, 2014). Studi kasus adalah jenis penelitian yang dilakukan. Studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara insentif secara menyeluruh dan mendalam terhadap suatu makhluk (individu), organisasi, atau gejala tertentu dengan subjek atau wilayah terbatas (Yin, 2009).

Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability*, sampel penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili tetapi hanya sebagai representasi dari fenomena yang akan diteliti. Metode pemilihan informan terpilih (*purposive sampling*), pemilihan informan mengalir (*snowball sampling*), dan informasi dari informan sebelumnya digunakan untuk memilih informan selanjutnya. *Purposive sampling* menggunakan karakteristik informan yang sebanding dengan tujuan penelitian (Suriani et al., 2023).

Pemilihan informan secara terpilih dilakukan dengan menghubungi informan kunci secara langsung, yakni Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Tidak seperti sampel probabilitas yang akan memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan statistik tentang populasi, sampel ini dimaksudkan untuk mencontohkan kelompok masyarakat dengan memberi informasi terbaik kepada peneliti tentang masalah penelitian yang sedang dipelajari (Creswell, 2015). Selanjutnya, informan dipilih secara mengalir berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya (*snowball sampling*). Sampling seperti bola salju (*snowball*) digunakan untuk



menemukan kasus yang menarik dari masyarakat dan menentukan siapa masyarakat yang memiliki banyak informasi (Creswell, 2015).

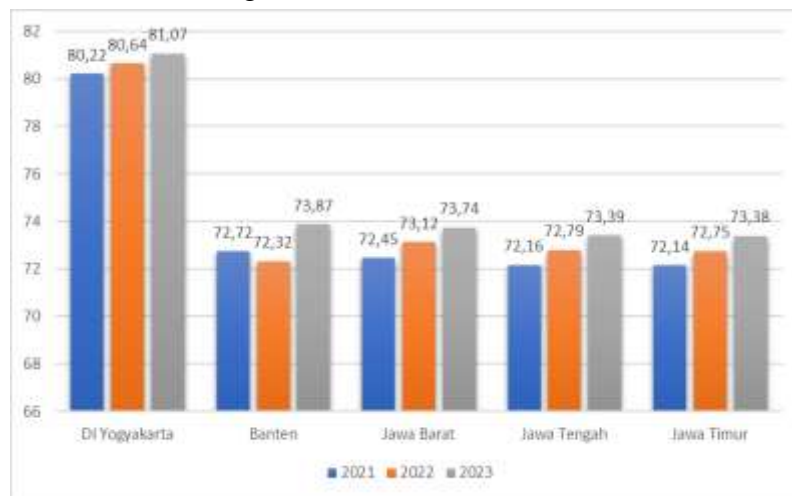
Dalam studi kasus, enam jenis metode pengumpulan data digunakan. Diantaranya adalah dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan partisipan, dan artefak fisik (Yin, 2009). Namun, pengamatan (observasi), wawancara, dokumen, dan bahan audiovisual adalah cara utama pengambilan data dalam penelitian. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ketiga jenis data ini adalah yang paling umum ditemukan dan merupakan representasi dari enam jenis data sebelumnya. Model Interaktif adalah teknik analisis data penelitian ini, yang terdiri dari tiga proses yang terjadi secara bersamaan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keputusan diinterpretasikan dengan memverifikasi data dan penelitian yang dikumpulkan selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Demografi Provinsi Banten

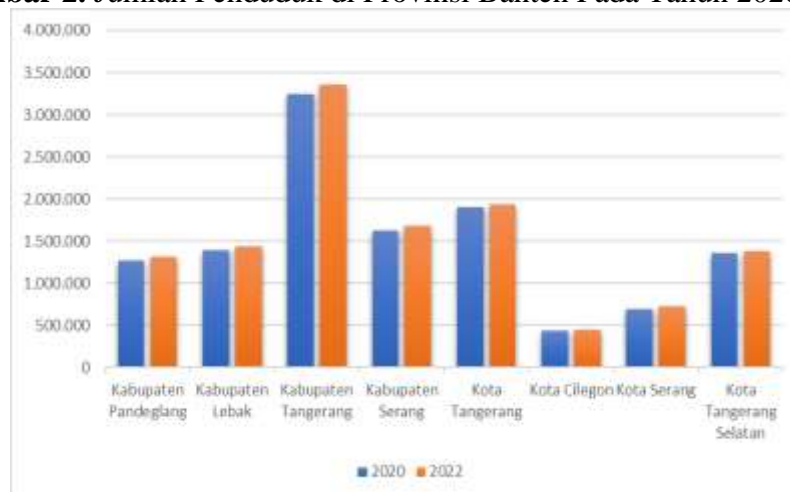
Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi cerminan signifikan dari kemajuan sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Si'lang et al., 2019). Indeks IPM mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup, memberikan pandangan menyeluruh terhadap kondisi pembangunan manusia di suatu provinsi. Data yang disajikan dalam tabel dibawah menampilkan angka-angka yang memberikan gambaran konkret mengenai pencapaian dan perkembangan setiap wilayah dalam kurun waktu tiga tahun dari 2021-2023. Melalui angka-angka tersebut, perubahan dan perbedaan tingkat kesejahteraan antarprovinsi dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Pada Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021-2023 menggambarkan perbandingan progres pembangunan sosioekonomi di beberapa provinsi di Indonesia. DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, mencatat peningkatan dari 81,11 pada 2021 menjadi 82,46 pada 2023, sementara DI Yogyakarta juga menunjukkan kenaikan dari 80,22 menjadi 81,07. Banten mengalami fluktuasi IPM, turun dari 72,72 pada 2021 menjadi 72,32 pada 2022, lalu meningkat menjadi 73,87 pada 2023. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan tren positif dengan peningkatan IPM selama periode tersebut. Analisis data menyoroti perbedaan dinamika pembangunan manusia di provinsi-provinsi tersebut, dan meskipun Banten mengalami fluktuasi, peningkatan signifikan pada tahun 2023 dapat dikatakan mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2.** Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Pada Tahun 2020-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Provinsi Banten pada bulan September Tahun 2020 adalah 11,9 juta jiwa. Selain itu, kepadatan penduduk di Provinsi Banten pada tahun 2022 mencapai 1.310 jiwa/km², dengan variasi yang signifikan antar delapan kabupaten/kota. Kota Tangerang mencatatkan kepadatan tertinggi sebesar 10.825 jiwa/km², sementara Kabupaten Lebak memiliki kepadatan terendah, yakni 433 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik, 2023).

Penambahan jumlah penduduk mencirikan bonus demografi, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Provinsi Banten. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus guna maksimal memanfaatkan bonus demografi ini. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah melalui peningkatan cakupan pendidikan di Provinsi Banten. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa akses pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, sambil meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan juga menjadi fokus penting. Oleh karena itu, pemerintah perlu aktif membuka lowongan pekerjaan di Provinsi Banten, menciptakan peluang kerja yang dapat menyerap sebagian besar tambahan populasi. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga mengoptimalkan potensi bonus demografi untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten secara keseluruhan.

Kondisi Umum Urusan Pendidikan

Pada tahun ajaran 2022/2023, Provinsi Banten memiliki 14.137 sekolah, dimana 9.930 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan 4.207 di bawah Kementerian Agama. Jenis fasilitas pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2.373, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 1.506, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4.634, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.115, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.581, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 1.118, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 603, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 739, dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 468.

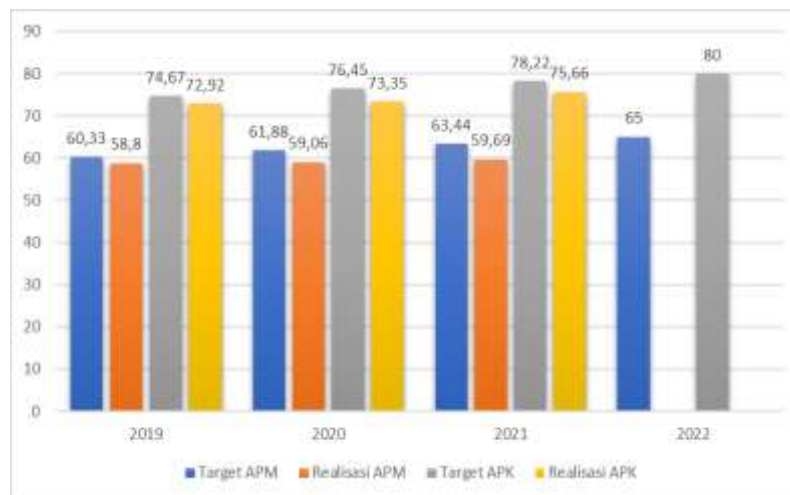
Pada tahun 2022, 68,31% penduduk usia 7–24 tahun di Provinsi Banten masih bersekolah. Persentase ini terbagi menjadi kelompok usia 7-12 tahun sebesar 99,33%, kelompok usia 13-15 tahun sebesar 96,39%, kelompok usia 16-18 tahun sebesar 69,22%, dan kelompok usia 19–24 tahun sebesar 22,14%. Angka partisipasi murni (APM) tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada jenjang SD/MI.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sebaliknya, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMP) adalah proporsi penduduk dalam kelompok usia sekolah pada jenjang tersebut yang sedang bersekolah sesuai dengan ketentuan usia



bersekolah di jenjang tersebut. Pendidikan Non-Formal (Paket C) juga dihitung pada tahun 2007. Tabel target dan realisasi APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) di Provinsi Banten tahun 2019–2022 disajikan di bawah ini. Salah satu perbedaan utama antara APM dan APK terletak pada usia sekolah siswa, yang merupakan persyaratan APM dan tidak diperlukan APK.

Gambar 3. Target dan Realisasi APM dan APK di Provinsi Banten Pada Tahun 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa capaian Provinsi Banten pada indikator APM dan APK jenjang pendidikan menengah selalu berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi dalam penyusunan dokumen perencanaan, atau mungkin juga oleh fenomena kecenderungan orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren salafi atau pesantren di luar wilayah Provinsi Banten setelah menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini tentunya berpengaruh dalam penurunan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMK pada Provinsi Banten.

Realisasi pencapaian anggaran Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021-2022 juga tidak mencapai target atau tidak mencapai 100%. Situasi ini terjadi karena adanya penyesuaian anggaran akibat dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah ketidakpenuhan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah, yang berdampak pada skema pembiayaan.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Pada Tahun 2021-2022

Program/ Kegiatan	Target Renstra 2021	Target Renstra 2022	Realisasi Capaian 2021	Rasio Capaian 2021
Program Pengelolaan dan Pendidikan				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.619.997.336.408	1.061.455.832.383	2.468.803.675.669	94,23
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	492.756.199.718	525.412.240.049	435.872.206.071	88,46
Pengelolaan Pendidikan Khusus	52.048.716.509	50.010.306.381	49.424.608.281	94,96
Program Pengembangan Kurikulum				



Program/ Kegiatan	Target Renstra 2021	Target Renstra 2022	Realisasi Capaian 2021	Rasio Capaian 2021
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	215.090.000	320.000.000	73.060.500	33,97
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (TIKP)		80.000.000		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	191.000.000		188.969.000	98,94
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	97.802.700.000	81.695.000.000	88.238.880.000	90,22

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023-2026

Pertama-tama, perlu diingat bahwa perbedaan hasil presentasi program pengelolaan pendidikan antara SMK, SMA, dan pendidikan khusus bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurikulum, pendekatan pengajaran, dan spesifikasinya masing-masing. Namun secara umum, pendidikan tingkat menengah kejuruan (SMK) sering kali memiliki fokus pada keterampilan praktis dan persiapan siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja. Sehingga dalam beberapa 69 kasus, kurangnya perhatian terhadap aspek akademis murni dapat menciptakan perbedaan hasil presentasi dengan SMA yang lebih menekankan aspek teoritis

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa SMK memiliki presentase terendah dalam bidang program pengelolaan pendidikan. Sehingga diperlukan strategi dan prioritas untuk dapat meningkatkan angka tersebut. Dalam hal ini, penerapan BLUD dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya perbaikan. Badan ini biasanya bertujuan untuk mandiri secara finansial, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pendidikan. BLUD dapat membawa efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Jika BLUD belum diterapkan dengan baik, hal ini dapat memengaruhi pengelolaan dan hasil presentasi program pendidikan di berbagai tingkatan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perbaikan dalam implementasi BLUD dan penyesuaian strategi pengelolaan pendidikan dapat membantu meningkatkan hasil presentasi program pendidikan, terutama di tingkat SMK.

Klasterisasi BLUD berdasarkan Permendagri

Klaster dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam proses perencanaan. Hal tersebut dikarenakan klasterisasi dalam BLUD pendidikan diadakan dengan tujuan untuk melihat potensi sekolah sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan BLUD. Berdasarkan acuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk mempermudah pemetaan sekolah-sekolah pada jenjang SMK yang terdapat di Provinsi Banten, klasterisasi dibuat kepada sekolah-sekolah sebagai pertimbangan dan penilaian sekolah layak BLUD yang kemudian dapat dijadikan bahan masukan oleh pemerintah setempat dalam menerapkan BLUD di bidang pendidikan yang terdapat di Provinsi Banten.

Tabel 2. Klasterisasi

No.	Cluster	Kategori
1	A	Sekolah siap menerapkan BLUD dengan mempertimbangkan bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi syarat substansi, teknis, dan administrasi.



2	B	Sekolah siap menerapkan BLUD dengan mempertimbangkan bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi beberapa syarat dan memiliki kendala dalam salah satu syarat. (Sebagai contoh bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi syarat substansi dan syarat teknis namun belum memenuhi syarat administrasi)
3	C	Sekolah belum siap menerapkan BLUD dengan mempertimbangkan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi syarat substansi, teknis, dan administrasi

Klasterisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memetakan sejauh mana sekolah-sekolah pada jenjang sekolah menengah atas yang terdapat di Provinsi Banten dalam menerapkan BLUD pendidikan. Dengan adanya klasterisasi tersebut dapat memperlihatkan kemampuan pada masing-masing sekolah sehingga dapat dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap sekolah dalam rencana penerapan BLUD pendidikan sesuai dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing sekolah.

Potensi Sekolah

Kebijakan BLUD di tingkat SMK dapat mengizinkan sekolah untuk memiliki kemandirian lebih dalam pengelolaan keuangan. SMK dapat mengelola dan menggunakan dana mereka secara lebih fleksibel untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan sekolah lainnya. Dengan implementasi kebijakan BLUD, SMK dapat memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan kurikulum dan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, potensi siswa, dan tuntutan pasar kerja. SMK dapat memiliki kewenangan dalam merekrut, memberikan insentif, dan mengelola kinerja guru dan staf sekolah sesuai dengan kebijakan dan rencana strategis sekolah.

Melalui kebijakan BLUD, SMK dapat meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana mereka untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan praktik kerja siswa. Peningkatan infrastruktur sekolah ini dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan dan memperkuat daya tarik SMK bagi calon siswa dan mitra industri. Kebijakan BLUD dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja sekolah. SMK diharapkan untuk memberikan laporan keuangan dan hasil pendidikan secara terbuka dan transparan kepada pihak berkepentingan. Untuk penerapan dan perubahan menuju BLUD sebuah instansi harus memenuhi beberapa persyaratan, sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 29-45. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan substantif, persyaratan teknis *dan persyaratan administratif*.

Untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan potensi sekolah, maka disimpulkan persyaratan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 yang kemudian diringkas berdasarkan dokumen pedoman penyusunan dokumen administratif penerapan BLUD SMK dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sesuai dengan hasil Observasi dan wawancara mendalam serta dengan mempertimbangkan rekomendasi dan saran yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah-sekolah yang terdapat di Provinsi Banten memiliki potensi untuk menerapkan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 8 sekolah di Provinsi Banten yang berpotensi menjadi sekolah BLUD yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Sekolah-sekolah potensial yang dinilai dapat menerapkan BLUD tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nama Sekolah yang Berpotensi BLUD

No	Nama Sekolah	Lokasi
1.	SMKN 2 Pandeglang	Kab. Pandeglang
2.	SMKN 1 Pandeglang	Kab. Pandeglang



3.	SMKN 3 Tangerang	Kota Tangerang
4.	SMKN 1 Cilegon	Kota Cilegon
5.	SMKN 2 Tangerang	Kota Tangerang
6.	SMKN 3 Cilegon	Kota Cilegon
7.	SMKN 3 Serang	Kota Serang
8.	SMKN 1 Serang	Kota Serang

Tabel 4. Pemenuhan Persyaratan BLUD Pada Setiap Sekolah

No.	Indikator BLUD	Nama Sekolah								Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Subtantif										
1	Menghasilkan barang dan jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Melaksanakan praktik bisnis yang sehat	√	√	√	√	√	√	√	√	
Teknis										
1	Berpotensi meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berupa peningkatan unit layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	
Administrasi										
1	Surat pernyataan peningkatan kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	Proses pengajuan BLUD
2	Pola tata kelola yang berupa kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Renstra sebagai dokumen perencanaan BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum tersedia
4	SPM Blud SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum tersedia
5	Laporan keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Laporan audit terakhir	√	√	√	√	√	√	√	√	

Kondisi Eksisting

Selain memperhatikan potensi sekolah, kondisi eksisting juga perlu dipertimbangkan dalam memetakan SMK BLUD. Sekolah yang ada di Provinsi Banten yang menjadi responden penelitian ini memiliki antusias yang cukup baik dalam rangka menerapkan BLUD. Beberapa diantaranya memperhatikan fasilitas penunjang yang dimiliki sekolah mereka untuk mendukung penerapan BLUD. Adanya fasilitas penunjang akan mempermudah transisi serta penerapan BLUD di SMK.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di SMK juga memiliki peran penting dalam penerapan BLUD. Beberapa SMK yang ada di Provinsi Banten sudah siap melaksanakan BLUD jika dilihat dari SDM yang telah dimiliki. Namun, beberapa lainnya membutuhkan tenaga ahli khusus di bidang pengelolaan keuangan, karena dengan diterapkannya BLUD di SMK yang ada akan mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan sekolah tersebut menjadi pengelolaan pribadi.

Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu penunjang/pendukung penerapan BLUD di SMK. Beberapa SMK Pusat Keunggulan (PK) sudah siap menerapkan BLUD jika dilihat dari segi sarana dan prasarana yang telah tersedia di SMK tersebut. Sedangkan beberapa sekolah lainnya belum menjadi sekolah PK dan masih dalam pengembangan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Dari segi produk, terdapat beberapa jenis produk yang dihasilkan



oleh SMK yang ada di Provinsi Banten, yaitu kuliner, jasa, alat, dimensi, kerajinan tangan, tata busana, dan alat filter sampah.

SMK yang ada di Provinsi Banten telah memiliki kerjasama dengan pihak lain dalam kurikulum pembelajaran mereka. Kerjasama tersebut berupa kerjasama dengan industri dengan kerjasama dengan pihak swasta. Dengan adanya produk yang telah dihasilkan dalam bekerja, membuktikan bahwa SMK yang terdapat di Banten memiliki potensi untuk di BLUD karena produk-produk yang dihasilkan tersebut dapat di pasarkan di masyarakat.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan klaster SMK yang menjadi lokus survei penelitian ini. Klaster tersebut terbagi menjadi klaster A dan klaster B, dan klaster C yang telah disesuaikan dengan kesiapan tiap sekolah berdasarkan persyaratan penerapan BLUD pada Permendagri No. 79/2018 tentang BLUD, yaitu secara substansi, teknis, dan administrasi. Berikut merupakan analisis kriteria penerapan BLUD di tiap SMK.

Tabel 5. Analisis Pemetaan Cluster BLUD

Cluster	Sekolah	Keterangan
A	1. SMKN 3 Tangerang 2. SMKN 2 Pandeglang 3. SMKN 1 Pandeglang	1. Menghasilkan barang dan jasa 2. Melaksanakan praktik bisnis yang sehat 3. Berpotensi meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 4. Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 5. Memiliki pola tata kelola berupa kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelompokan SDM 6. Laporan keuangan 7. Laporan audit
B	1. SMKN 1 Cilegon 2. SMKN 3 Cilegon 3. SMKN 2 Tangerang 4. SMKN 3 Serang 5. SMKN 1 Serang	1. Menghasilkan barang dan jasa 2. Melaksanakan praktik bisnis yang sehat 3. Berpotensi meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 4. Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 5. Laporan keuangan
C	-	-

SMKN 3 Tangerang, SMKN 2 Pandeglang, dan SMKN 1 Pandeglang masuk ke dalam cluster A karena sudah memenuhi semua syarat/kriteria penerapan BLUD berdasarkan Permendagri No. 79/2018 tentang BLUD. Berikut merupakan hasil analisis kriteria di tiap sekolah dalam klaster A yang menjadi responden survei di Provinsi Banten.

SMKN 3 Tangerang

SMKN 3 Tangerang sudah pernah menyusun dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan BLUD pada tahun 2019, namun memang masih menunggu Renstra mengenai BLUD diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. SMKN 3 Tangerang merupakan SMK Pusat Keunggulan (PK) pada jurusan tata kuliner/tata boga. Beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh jurusan tata boga adalah berbagai jenis roti yang dijual di cafe yang ada di SMKN 3 Tangerang, yaitu Educaffe SMAKTA. Berdasarkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk seluruh jurusan, SMKN 3 Tangerang memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik untuk melaksanakan *Teaching Factory*. Sejak tahun 2019, SMKN 3 Tangerang sudah menerapkan *Teaching Factory* untuk mempersiapkan penerapan BLUD terutama pada jurusan



yang berpotensi BLUD. SMKN 3 Tangerang juga sudah bermitra dengan 145 industri, dimana kerjasama tersebut dapat mendukung praktek *Teaching Factory* sesuai dengan standar industri yang sebenarnya. Selain jurusan tata boga, *Teaching Factory* juga sudah diterapkan pada jurusan perhotelan dan tata busana. SMKN 3 Tangerang juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, industri, dan alumni sebagai instruktur/praktisi, yang mana hal ini dilakukan sebagai strategi penguatan peserta didik. Kerjasama ini tentunya dapat mendukung kebutuhan tenaga pendidik di SMKN 3 Tangerang untuk semakin mendukung penerapan BLUD.

SMKN 2 Pandeglang

SMKN 2 Pandeglang sudah pernah mengajukan BLUD pada tahun 2019, dan sudah pernah mengikuti diklat penyusunan proposal BLUD di Bandung. Secara administratif, SMKN 2 Pandeglang sudah siap untuk menerapkan BLUD, namun hanya menunggu Renstra mengenai BLUD diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. SMKN 2 Pandeglang merupakan salah satu SMK Pusat Keunggulan (PK) di Provinsi Banten. Kurikulum yang ada di SMK PK sudah disesuaikan dengan kurikulum link and match sehingga sudah menyesuaikan kondisi nyata industri. Jurusan unggulan pada SMK PK ini adalah jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (APHP). *Teaching Factory* sudah diterapkan di beberapa jurusan yang ada di SMKN 2 Pandeglang. Beberapa produk unggulan SMKN 2 Pandeglang yaitu seperti Sari Lemon, Bibit Pisang Cavendish, dan Tanaman Anggrek dihasilkan oleh jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (APHP). Jurusan ini telah memiliki lab untuk produksi di bidang pertanian, dimana SMKN 2 Pandeglang dikenal dengan latar belakang sebagai SMK Pertanian. Produk-produk tersebut sudah mulai didistribusikan untuk dijual oleh jurusan APHP. Beberapa SDM yang ada di SMKN 2 Pandeglang juga sudah tersertifikasi, salah satunya pada jurusan APHP. Namun SDM lainnya perlu dilakukan pengembangan lainnya agar SDM yang ada di SMKN 2 Pandeglang menjadi tenaga pendidik yang profesional. Selain itu juga dapat mendukung sistem pengelolaan keuangan di SMKN 2 Pandeglang agar dapat mendukung penerapan BLUD. Sarana dan prasarana yang ada di SMKN 2 Pandeglang sudah cukup baik secara merata dan sesuai dengan standar industri. Namun saat ini jurusan APHP masih menjadi jurusan yang paling unggul karena juga merupakan jurusan SMK PK, sedangkan untuk jurusan lainnya membutuhkan dukungan dan perkembangan lebih lanjut untuk lebih mendukung penerapan BLUD.

SMKN 1 Pandeglang

SMKN 1 Pandeglang juga merupakan SMK Pusat Keunggulan (PK) di Provinsi Banten dan telah memiliki *Teaching Factory* di beberapa jurusan. *Teaching Factory* dapat menjadi langkah awal yang mendukung transisi ke BLUD. Salah satu *Teaching Factory* yang telah berjalan dengan unit bisnis yaitu jurusan pemasaran/bisnis retail. *Teaching Factory* yang telah tersedia untuk jurusan ini yaitu berupa Alfamart yang bekerja sama dengan PT. Alfaria Trijaya TBK. Selain itu jurusan perhotelan dan kuliner juga bekerja sama dengan Hotel Aston dan Hotel Le Semar (Serang). Kedua jurusan ini sama-sama bekerja sama dengan kedua hotel tersebut karena jurusan perhotelan dan kuliner merupakan jurusan satu rumpun. Jurusan akuntansi juga bekerja sama dengan Bank Banten dalam penerapan *Teaching Factory*. Selain keempat jurusan tersebut, jurusan lain yang diprioritaskan untuk persiapan BLUD adalah jurusan pariwisata.

Secara teknis, kondisi *Teaching Factory* yang ada sudah mendukung penerapan BLUD, namun memang membutuhkan pengembangan di beberapa hal untuk lebih memaksimalkan jalannya BLUD. Selain itu, sekolah yang belum BLUD tidak diperbolehkan membuka unit bisnis sendiri, sehingga *Teaching Factory* yang diterapkan sebagian besar merupakan kerjasama dengan pihak luar. Secara administrasi, SMKN 1 Pandeglang sudah pernah membuat proposal dan laporan pengajuan BLUD, yang mengindikasikan bahwa SMKN 1 Pandeglang sudah siap secara administrasi, namun hanya menunggu Renstra mengenai BLUD diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.



Selanjutnya, SMKN 1 Cilegon, SMKN 3 Cilegon, SMKN 2 Tangerang, SMKN 3 Serang, dan SMKN 1 Serang masuk ke dalam cluster B karena memenuhi beberapa syarat/kriteria penerapan BLUD berdasarkan Permendagri No. 79/2018 tentang BLUD, namun masih membutuhkan pengembangan di beberapa hal/kriteria. Berikut merupakan hasil analisis kriteria di tiap sekolah dalam klaster B yang menjadi responden survei di Provinsi Banten.

SMKN 1 Cilegon

Pada tahun 2020 SMKN 1 Cilegon sudah menjadi Center of Excellence dan pada tahun 2021 sudah menjadi SMK-PK. Sarana dan prasarana yang tersedia di jurusan PK di SMKN 1 Cilegon sudah sesuai dengan standar industri, sedangkan jurusan nonPK masih terdapat beberapa peralatan yang tidak sesuai kebutuhan dan standar industri. Beberapa kerjasama dengan pihak luar juga sudah terjalin untuk mendukung pembelajaran di SMKN 1 Cilegon, seperti adanya penyalarsan kurikulum, PKL dan magang.

Produk unggulan yang telah dihasilkan oleh jurusan-jurusan yang ada di SMKN 1 Cilegon khusus pada jurusan PK beberapa diantaranya sudah layak jual, namun memang belum dipasarkan secara maksimal karena belum ada payung hukum dan arahan resmi untuk unit bisnis hasil produk unggulan. Beberapa produk lainnya masih berupa prototype dan membutuhkan perkembangan kualitas, seperti alat filter sampah yang dihasilkan oleh jurusan mekatronika, yang diharapkan dapat menerapkan Internet of Things (IoT) dalam pemrogramannya. SMKN 1 Cilegon sendiri membutuhkan pengelolaan dana yang lebih matang agar cost dan benefit dari produk-produk unggulan tersebut dipasarkan sesuai standar. SMKN 1 Cilegon menunggu arahan resmi dan Renstra mengenai BLUD dari Dinas Pendidikan untuk dapat memaksimalkan dan mengelola unit bisnis produk unggulan yang telah ada.

SMKN 1 Cilegon juga sudah melakukan pelatihan secara rutin setiap tahunnya untuk tenaga pendidik/guru yang ada di SMKN 1 Cilegon. Hal ini dapat mendukung peningkatan kualitas SDM/guru di SMKN 1 Cilegon dimana akan berdampak pada penerapan BLUD. Selain itu juga telah terdapat tenaga pendidik/guru yang sudah tersertifikasi/berlisensi. Secara kualitas, SDM di SMKN 1 Cilegon sudah sangat baik, hanya saja diperlukan penambahan dari segi kuantitasnya.

SMKN 3 Cilegon

SMKN 3 Cilegon merupakan SMK Pusat Keunggulan (PK) pada jurusan tata busana dan tata boga/kuliner. SMKN 3 Cilegon memiliki pengelola masing-masing untuk setiap jurusannya. *Teaching Factory* juga sudah berjalan di SMKN 3 Cilegon, seperti yang berbasis bengkel dan pelaksanaannya, dan alat serta sarana prasarannya sudah sesuai dengan standarnya. SMKN 3 Cilegon sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah, perusahaan swasta, hingga restoran dalam pembelajarannya, dimana tidak hanya berupa magang saja tetapi juga perekrutan dan jobfair. Selain terserap di industri-industri yang ada, lulusan SMKN 3 Cilegon juga sebagian besar membuka usaha sendiri, seperti membuka butik, makeup artist, dan modelling. Jadi secara keseluruhan, kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar sebagian besar masih berfokus pada pasca kelulusan, belum berfokus pada penyesuaian kurikulum dan pembelajaran di SMKN 3 Cilegon secara maksimal.

Jika dilihat dari segi SDM, masih perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik/guru yang sesuai dengan kebutuhan jurusan yang ada di SMKN 3 Cilegon. Seperti pada jurusan Usaha Layanan Wisata (ULW). Jurusan ini menjalin kerjasama dengan praktisi ekonomi kreatif, pariwisata, businessman, dan akuntansi untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik di jurusan ini. Sedangkan pelatihan untuk upskill juga tidak bisa dilakukan secara berkala karena adanya kuota nasional. Selain dari kerjasama praktisi, kekurangan jumlah tenaga pendidik/guru jurusan ULW dipenuhi dengan cara kerjasama dengan alumni yang telah memiliki usaha yang relevan dengan jurusan yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik.



Beberapa produk yang dihasilkan oleh SMKN 3 Cilegon sudah dipasarkan, salah satunya pada coffee shop yang ada di SMKN 3 Cilegon yang mendukung kurikulum Kewirausahaan (KWU). Namun produk-produk tersebut belum dapat dijual secara bebas karena belum ada izin pengelolaan unit bisnis. Sehingga produk-produk tersebut dapat dikembangkan kembali untuk meningkatkan nilai jualnya di masyarakat nanti. Dana yang didapatkan dari hasil penjualan internal tersebut juga kembali ke jurusan masing-masing untuk dikelola kembali. Jadi belum ada pengelolaan dana secara terpusat di SMKN 3 Cilegon untuk seluruh jurusan.

Secara administrasi, SMKN 3 Cilegon siap menindaklanjuti persiapan BLUD sekaligus menunggu keputusan resmi dan Renstra mengenai BLUD yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. SMKN 3 Cilegon juga belum menerapkan SPM, dan masih berpedoman pada standar nasional pendidikan saja.

SMKN 2 Tangerang

SMKN 2 Tangerang belum menjadi SMK Pusat Keunggulan (PK). Saat ini, SMKN 2 Tangerang masih berfokus pada didikan untuk mengolah dan memasarkan produk. Beberapa produk yang dihasilkan oleh jurusan-jurusan di SMKN 2 Tangerang sudah dipasarkan di SMKN 2 Tangerang sendiri. Secara keseluruhan, kualitas produk yang dihasilkan dapat lebih ditingkatkan kembali agar dapat memenuhi standar hasil industri dan dapat sesuai dengan standar pasar.

Sarana dan prasarana yang tersedia di SMKN 2 Tangerang memerlukan beberapa perbaikan dan pengembangan. SMKN 2 Tangerang juga memiliki lahan kosong yang cukup luas, namun belum dapat dikelola karena keterbatasan biaya dan sistem pengelolaan dana. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk tiap jurusan di SMKN 2 Tangerang diharapkan selaras dengan pengelolaan lahan kosong yang telah tersedia. Seperti pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif maupun Teknik Bisnis Sepeda Motor, tentunya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh jurusan ini membutuhkan lahan/tempat yang cukup luas untuk meletakkan/ menyimpannya.

SMKN 2 Tangerang telah melakukan kerjasama dengan beberapa industri/perusahaan. Namun kerjasama ini masih berfokus pada PKL dan penerimaan tenaga kerja pasca kelulusan, belum berfokus pada *Teaching Factory* sehingga masih perlu dikembangkan dan diselaraskan kembali dengan kurikulum SMKN 2 Tangerang. Sedangkan jika ditinjau dari SDM yang tersedia, SMKN 2 Tangerang memerlukan pengembangan baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Saat ini jam mengajar guru sudah overload, sedangkan adanya aturan/sistem baru dalam penyediaan guru menjadi hambatan untuk menyediakan dan menambah guru yang sesuai dengan kebutuhan. Secara administrasi, SMKN 2 Tangerang menunggu adanya sistem/program resmi serta Renstra mengenai BLUD yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga dapat menindaklanjuti persiapan BLUD.

SMKN 3 Serang

SMKN 3 Serang menunggu adanya keputusan resmi dan Renstra mengenai BLUD yang diterbitkan Dinas Pendidikan. Selain itu, meskipun sudah dilakukan beberapa sosialisasi mengenai BLUD, namun masih diperlukan motivasi dan dorongan lebih untuk mendukung potensi penerapan BLUD di SMKN 3 Serang.

SMKN 3 Serang sudah memiliki beberapa hasil produk yang dapat dijual dari beberapa jurusan yang ada di SMKN 3 Serang. Jika dilihat dari omset penjualan, omset SMKN 3 Serang belum dapat dikatakan tinggi karena masih diperlukan pengembangan kualitas, kuantitas, dan jenis produk unggulan yang dihasilkan oleh jurusan-jurusan di SMKN 3 Serang. Seperti contoh pada restoran yang ada di SMKN 3 Serang yang terbatas melayani jumlah pelanggan, dikarenakan masih sebagai praktek saja, belum dikomersilkan menjadi unit usaha. Padahal, jurusan kuliner merupakan jurusan yang selalu didorong kemajuannya di SMKN 3 Serang ini, dan merupakan jurusan yang menjadi Pusat Keunggulan (PK). Selain itu, jurusan kuliner



SMKN 3 Serang juga sudah bekerja sama dengan Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande, sedangkan untuk guru tamu bukan hanya dari hotel tersebut namun juga dari Hotel Horison.

Sarana dan prasarana yang tersedia di SMKN 3 Serang ini dapat dikatakan sudah cukup jika dilihat dari segi kuantitas. Namun terdapat beberapa alat yang masih membingungkan untuk dioperasikan oleh siswa maupun tenaga pendidik di SMKN 3 Serang. Jadi masih diperlukan adanya pelatihan khusus untuk menggunakan/mengoperasikan alat-alat tersebut. Potensi yang dimiliki oleh jurusan lain selain jurusan kuliner perlu ditingkatkan kembali. Selain itu juga harus disesuaikan dengan standar industri yang sebenarnya, baik dari segi sarana dan prasarana, SDM/tenaga pendidik, produk unggulan, hingga sistem pembelajarannya. 5.

SMKN 1 Serang

SMKN 1 Serang sudah pernah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan BLUD. SMKN 1 Serang hanya menunggu Renstra mengenai BLUD diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu juga perlu adanya penyelarasan pemahaman BLUD bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan BLUD di Provinsi Banten.

Saat ini, jurusan-jurusan yang ada di SMKN 1 Serang sudah menghasilkan beberapa produk, didukung dengan peralatan yang sudah cukup memadai. Namun produk-produk tersebut belum dapat disebarluaskan karena belum ada unit bisnis secara resmi. Jadi pengelolaan dana hasil penjualan produk secara internal tersebut masih dikelola oleh masing-masing jurusan untuk perputaran dana, seperti untuk modal produksi maupun maintenance peralatan yang ada. SMKN 1 Serang telah memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan/industri seperti PT Shangfang dari Taiwan. Tetapi beberapa *Teaching Factory* yang telah dilaksanakan menjadi temuan permasalahan tersendiri bagi BPK, sehingga unit bisnis belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Jadi, masih diperlukan penyelarasan kurikulum dengan dunia industri di semua jurusan yang ada di SMKN 1 Serang. Selain itu juga diperlukan sistem pengelolaan dana yang lebih teratur agar dapat mendukung kegiatan *Teaching Factory* di SMKN 1 Serang.

Secara SDM, masih banyak tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Banyaknya tenaga pendidik/guru yang pensiun juga mengurangi kuantitas guru yang telah sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun SMKN 1 Serang sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam hal peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga tenaga pendidik di SMKN 1 Serang memiliki sertifikasi industri/sertifikasi profesi.

Menurut Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Sub Direktorat Badan Layanan Umum Daerah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tujuan BLUD adalah untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama kepada peserta didik. Berdasarkan tujuan tersebut, dengan adanya kondisi eksisting yang terdapat di Provinsi Banten, dinilai dapat menunjang penerapan BLUD pendidikan di Provinsi Banten. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kondisi dimana sekolah dapat melaksanakan produktivitas baik itu dalam kegiatan belajar mengajar, menghasilkan produk dan menerapkan praktik bisnis yang sehat seperti melaksanakan proses produksi dan belajar melaksanakan proses pemasaran maka sekolah jenjang SMK yang terdapat di Provinsi Banten dinilai mampu untuk melaksanakan BLUD pendidikan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kriteria yang digunakan dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan di Provinsi Banten. Kriteria tersebut disusun berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018 yang



menjelaskan bahwa terdapat tiga syarat BLUD yakni syarat substansi, teknis, dan administrasi. Berdasarkan permendagri 79 tahun 2018 tersebut maka disusun kriteria yang di klasifikasikan sesuai cluster mulai dari cluster A hingga cluster C. Cluster A, dengan penjelasan bahwa sekolah siap menerapkan BLUD dengan mempertimbangkan bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi syarat substansi, teknis, dan administrasi. Cluster B, dengan penjelasan bahwa sekolah siap menerapkan BLUD dengan mempertimbangkan bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi beberapa syarat dan memiliki kendala dalam salah satu syarat. (Sebagai contoh bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi syarat substansi dan syarat teknis namun belum memenuhi syarat administrasi). Cluster C, dengan penjelasan bahwa sekolah belum siap menerapkan BLUD dengan mempertimbangkan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi syarat substansi, teknis, dan administrasi.

Terdapat beberapa sekolah yang dinilai menjadi sekolah rujukan dalam rencana penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan di Provinsi Banten. Sekolah-sekolah tersebut dibagi menjadi beberapa cluster sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. Cluster A, terdiri dari SMKN 3 Tangerang SMKN 2 Pandeglang, dan SMKN 1 Pandeglang. Cluster B, terdiri dari SMKN 1 Cilegon, SMKN 3 Cilegon, SMKN 2 Tangerang, SMKN 3 Serang, dan SMKN 1 Serang

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk pembaca dan pemangku kepentingan terkait dengan Kesiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah jenjang Menengah Kejuruan (SMK). Pertama, Perlu adanya perluasan assesment khususnya di sekolah-sekolah yang berpotensi untuk penerapan BLUD. Contohnya adalah SMKN 7 Kota Tangerang. Kedua, Penyesuaian Renstra pendidikan dalam kaitannya dengan rencana penerapan BLUD pendidikan di provinsi banten sebagai pemenuhan syarat administratif sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018. Ketiga, Peningkatan *Teaching Factory* yang menyeluruh pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalam memasuki dunia kerja serta meningkatkan kemampuan entrepreneurship kepada peserta didik. Keempat, Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai fasilitator dan motivator untuk penerapan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan di Provinsi Banten. Kelima, Pentingnya kolaborasi dengan stakeholder baik pada dunia industri maupun swasta untuk membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah SMK pada beberapa aspek seperti memberi peluang yang lebih besar kepada peserta didik dalam mengasah kemampuannya dalam beberapa kegiatan seperti magang dan pelatihan, sinergitas pendidikan akademik dan softskill, serta digitalisasi pemasaran dengan pemanfaatan platform digital guna meningkatkan kemampuan peserta didik dan hasil produksi siswa SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2021). Meningkatkan Kompetensi peserta didik melalui model pembelajaran Teaching Factory dalam mata pelajaran produktif SMK di Aceh Timur. *Journal of Education Science*, 6(2), 157–164.
- Amany, T. S., Maharani, D. P., & Firmansyah, A. (2020). PERAN PENDAPATAN DAN UKURAN BADAN LAYANAN UMUM TERHADAP AKREDITASI BADAN LAYANAN UMUM PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 78–89. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1004>
- Bala, R. P. (2023). FLEKSIBILITAS BADAN LAYANAN UNIT DAERAH (BLUD) DAN IMPLEMENTASINYA UNTUK MUTU DAN DAYA SAING. *JANAKA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT KEWIRAUSAHAAN INDONESIA*, 4(2), 40–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.36600/janaka.v4i2.349>
- Baskoro, F., Rohman, M., Muslim, S., Anifah, L., Buditjahjanto, I. A., & Suprianto, B. (2022).



- Teaching Factory Management in the Edutel Sector at SMK Negeri 1 Surabaya. In *Proceeding Series of International Conference on Arts and Humanities* (Vol. 2).
- Creswell, W. J. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Belajar.
- Godda, H. (2018). Free Secondary Education and the Changing Roles of the Heads of Public Schools in Tanzania: Are They Ready for New Responsibilities? *Open Journal of Social Sciences*, 06(05), 1–23. <https://doi.org/10.4236/jss.2018.65001>
- Kristanto, K., Kuat, T., & Noor, B. (2023). The Contribution Teaching Factory On Practical Learning Process, Production Process And Vocational School Quality. *Journal of Social Science (JoSS)*, 2(5), 446–455. <https://doi.org/10.57185/joss.v2i5.72>
- Mahfuda, A. N. (2022). Studentpreneur pada Pembelajaran Kemandirian Wirausaha Siswa-siswi Kelas XII Agribisnis dan Holtikultura di SMK Negeri 5 Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 3(2), 98–111.
- Mayasari, S. (2020). INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION POLICY IN RELATION TO THE NATIONAL EDUCATION GOALS: A THEORETICAL PERSPECTIVE. *The Journal of English Literacy Education: The Teaching and Learning of English as a Foreign Language*, 6(2), 81–93. <https://doi.org/10.36706/jele.v6i2.10076>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Cakra Books.
- Nuryanto, A., & Eryandi, K. Y. (2020). The 21st Century Ideal Skills for Vocational High Schools. *Proceedings of the International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200204.026>
- Prianto, A. (2022). *The effect of the implementation of teaching factory and its learning involvement toward work readiness of vocational school graduates*.
- Saputro, I. N. (2024). Literature Review of The Development of a Green Campus Teaching Factory-Based Learning Model in Vocational Schools in Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 16(1), 65–76. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.3438>
- Shaturaev, J. (2021). Indonesia: superior policies and management for better education (Community development through Education). *Архив Научных Исследований*, 1(1).
- Si'lang, I. L. S., Hasid, Z., & Priyagus, P. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jmmn.v11i2.5953>
- Sudiyono, S., Fajarini, C. D., Parwanto, P., Perdana, N. S., & Waspodo, R. M. (2019). *Teaching factory: upaya peningkatan mutu lulusan dan strategi pendanaan di SMK*.
- Suharno, Pambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational education in Indonesia: History, development, opportunities, and challenges. *Children and Youth Services Review*, 115, 105092. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105092>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and method (edisi ke-4)*. Sage Publication.
- Yulius Hari, Darmanto, D., Paramitha, M. P., & Minny Elisa Yanggah. (2023). Design of a Mini Bank Service System for Regional Public Service Agencies (BLUD) in Vocational High Schools. *Indonesian Journal of Society Development*, 2(2), 81–88. <https://doi.org/10.55927/ijsd.v2i2.3084>